

AUDIT TEKNOLOGI

BPPT Akan Audit DAS Rawan Banjir

Jakarta, Kompas - Saat ini banyak daerah aliran sungai, terutama di Jawa, rawan banjir. Kerusakan sistem drainase serta perubahan struktur badan sungai dan lingkungan sekitar daerah aliran sungai diduga kuat menjadi penyebab bencana itu.

Untuk memastikan faktor penyebab, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan mengajukan audit teknologi daerah aliran sungai (DAS). Hasilnya akan disampaikan kepada pihak terkait sebagai rekomendasi untuk pembenahan.

Hal ini disampaikan Kepala BPPT Marzan Aziz Iskandar dalam jumpa pers, Rabu (4/1), di Jakarta. Jumpa pers itu tentang diskusi interaktif bertema "Peran Audit Teknologi dalam Bidang Infrastruktur untuk Melindungi Kepentingan Publik dan Menghindarkan Bencana Teknologi" yang akan diadakan Rabu (11/1).

Usulan audit teknologi DAS diajukan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan pemda setempat. Audit teknologi dilakukan menyangkut desain, pengelolaan, dan pemeliharaan DAS. Saat ini banyak DAS mengalami penurunan daya tampung air karena proses pendangkalan dan penciptaan. Namun, kondisi ini tidak segera diatasi melalui normalisasi dan rehabilitasi DAS.

Menurut Kepala Pusat Audit Teknologi BPPT Arya Rezavidi, kewenangan BPPT audit teknologi diatur dengan keputusan presiden. Namun, dari segi personel, belum ada dasar legal yang mengukuhkan profesionalisme mereka, Karena itu, Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) akan mengeluarkan sertifikat profesi auditor teknologi, kata Arya, yang juga Sekretaris Jenderal IATI.

Audit teknologi selama ini dilakukan perekayasa BPPT dengan berbagai kepakaran. Tenaga yang dikerahkan untuk itu 2.000 peneliti. Nantinya audit teknologi dapat dilakukan auditor swasta yang memiliki sertifikat.

Menurut Marzan, IATI saat ini akan fokus pada audit infrastruktur karena persoalan di sektor tersebut sudah kronis.

"Peristiwa ambruknya jembatan Kutai Kartanegara di Kalimantan merupakan contoh kasus buruknya manajemen infrastruktur di Indonesia," ujarnya.

Ambruknya jembatan itu diduga karena buruknya perencanaan, tidak memadainya pemeliharaan, pengawasan proyek lemah, dan pengerahan tenaga bidang konstruksi tak profesional.

Marzan memaparkan, IATI tengah memperjuangkan pengesahan Undang-Undang Audit Teknologi. Saat ini draf akademis rancangan UU Audit Teknologi dalam penyempurnaan.

Undang-undang ini akan menguatkan status IATI sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan sertifikat profesi auditor teknologi di Indonesia dan peran BPPT dalam melaksanakan auditor teknologi secara independen serta rekomendasi yang dikeluarkan memiliki kekuatan hukum.

IATI berperan melihat kelayakan dan keamanan teknologi yang digunakan, memastikan tidak ada penyimpangan dengan spesifikasi yang ditetapkan saat pembangunan, dan memantau pengelolaan aset. Ketika terjadi bencana teknologi di sektor infrastruktur, IATI melakukan audit forensik untuk mencari faktor penyebab teknis dan nonteknis terkait dengan manajemen infrastruktur. (YUN)